



IMPLEMENTATION OF POLITICAL PARTY AS FACILITY OF POLITICS RECRUITMENT

(Cadre Case Study at DPC PKB Sub-Province of Ponorogo)
Nia Rochmawaty 1, Drs.H. Sulton, M,Si 2, Ambiro Puji Asmaroini, M.Pd 3
Muhammadiyah University Ponorogo
Niarochmawaty.peace@gmail.com

Abstract

Target of this research was (1) Knowing model execution of cadre recruitmet exist in DPC PKB Sub-Province of Ponorogo (2) Knowing principle of recruitment cadre exist in DPC Party Evocation Nation Sub-Province of Ponorogo (3) Knowing the nature of party cadre rekrutmen executed by DPC Party of Kebangkitan Nasional Sub-Province of Ponorogo (4) Knowing band of recruitment party cadre did by DPC Party Evocation Nation Sub-Province of Ponorogo. This Research use method of descriptive qualitative this research was executed DPC PKB Sub-Province of Ponorogo, source of its data from 30 one who consist of cadre, member and official member of PAC and official member of DPC PKB Sub-Province of Ponorogo. This Research use interview method, triangulation and documentation. While data analysis use descriptive data analysis qualitative. Pursuant to research which had model cadre recruitmen at DPC PKB Sub-Province of Ponorogo use model of partisanship represent based rekrutmen of loyalitas and try to collect partisan with less is paying attention interest proved to wait its his in party come according to condition and rule of moment enlist in party. Principal of cadre recruitmen in DPC PKB according to regulation of government of no 11 year 2002 that is having to Indonesai Citizen (WNI), have never been punished prison, having education, skilled, membership, well-behaved, healthy spirit and bodily, did not pursuant to faction, race and also religion. While nature of its it DPC PKB Ponorogo have the nature of open according to AD / CHAPTER art of IV Section 5 that national party, democratic, and open whoever may become cadre, member as according to existing order. band of Rekrutmen cadre exist in DPC PKB Sub-Province of Ponorogo use coalition band and band of kaderisasi to recruit member cadre through training process and construction.

Keyword: Political Party, Political Rekrutmen, Party of Kebangkitan Nasional (PKB)

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Mengetahui model pelaksanaan rekrutmen kader yang ada di DPC PKB Kabupaten Ponorogo (2) Mengetahui prinsip rekrutmen kader yang ada di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Ponorogo (3) Mengetahui sifat rekrutmen kader partai yang dilaksanakan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Ponorogo (4) Mengetahui jalur rekrutmen kader partai yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif Penelitian ini dilaksanakan di DPC PKB Kabupaten Ponorogo, sumber datanya dari 30 orang yang terdiri dari kader, anggota dan pengurus PAC dan pengurus DPC PKB Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan model rekrutmen kader di DPC PKB Kabupaten Ponorogo menggunakan model partisanship merupakan rekrutmen yang didasarkan atas loyalitas dan berusaha mengumpulkan partisan dengan kurang memperhatikan kompetensi dibuktikan nanti komitmennya di partai asal sesuai syarat dan ketentuan saat mendaftar di partai. Prinsip rekrutmen kader di DPC PKB sesuai peraturan pemerintah no 11 tahun 2002 yaitu harus Warga Negara Indonesia (WNI), tidak pernah dihukum penjara, mempunyai pendidikan, ketrampilan, keahlian, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, tidak berdasarkan golongan, agama maupun ras. Sedangkan sifat rekrutmennya DPC PKB Ponorogo mempunyai sifat terbuka sesuai AD/ART BAB IV Pasal 5 bahwa partai bersifat kebangsaan, demokratis, dan terbuka siapapun boleh menjadi kader, anggota sesuai dengan aturan yang ada. Jalur rekrutmen kader yang ada di DPC PKB Kabupaten Ponorogo menggunakan jalur koalisi dan jalur kaderisasi untuk merekrut kader anggota dengan melalui proses pelatihan dan pembinaan.

Kata Kunci: Partai Politik, Rekrutmen Politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

How to Cite: Nia Rochmawaty (2017). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik (Studi Kasus Kader pada DPC PKB Kabupaten Ponorogo). Penerbitan Artikel Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 1(1): 87-101

PENDAHULUAN.

Setiap partai politik memiliki rekrutmen yang berbeda, dimana rekrutmen anggota partai disesuaikan dengan system politik yang dianut oleh partai tersebut (Fadilah putra 2003:19). Salah satu partai yang lahir setelah runtuhnya kekuasaan orde baru atau pada era reformasi, di tengah tuntutan demokrasi adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Reformasi telah mendorong niat kalangan NU untuk mendirikan partai melalui tokoh-tokohnya, termasuk KH. Abdurrahman 3 Wahid, KH. Ilyas Rucyat, dan KH. Mustofa Bisri. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lahir pada 23 Juli 1998. PKB lahir setelah Pengurus Besar NU (PBNU) menerima banyak aspirasi dan usulan dari masyarakat NU, mengenai perlunya masyarakat NU mendirikan partai politik sebagai wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi. Seb

Di Kabupaten Ponorogo munculnya PKBn dibadani oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) bersama Tim 5 yang bertempat di Kampus INSURI Ponorogo pada tanggal 18 September 1998, bersama-sama bahu-membahu dengan PCNU dan tokoh-tokoh lainnya melakukan sosialisasi ke Kecamatan dan Desa-desanya, yang selanjutnya dideklarasikan PKB Kabupaten Ponorogo pada hari ahad, tanggal 29 November 1998 bertempat di Alun-alun Ponorogo yang saat itu dihadiri oleh bapak Dr. KH. Said Agil Siradj yang kemudian disusul oleh penyelenggaraan deklarasi-deklarasi di Kecamatan dan Desa-

desa (Laporan pertanggungjawaban PKB: 2016).

Melalui rekrutmen politik aspirasi rakyat akan tersampaikan. Kader-kader PKB merupakan kader-kader yang yang mempunyai loyalitas tinggi, setiap pergantian pimpinan minim adanya gejolak internal partai yang mencuat di public. Belum lama ini sekitar bulan Oktober 2016 DPC PKB baru mengadakan MUSCAB yang berlangsung secara damai dan menghasilkan pemimpin partai dengan cara aklamasi. PKB yang merupakan partai yang lahir dari organisasi NU dan di Ponorogo kita tahu bahwa banyak warga NU akan tetapi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Ponorogo tidak mendominasi mendapatkan kursi terbanyak. Dapat dilihat dari perolehan kursi di DPRD Kabupaten Ponorogo.

Sebagai partai besar islam, PKB Kabupaten Ponorogo yang mempunyai basis massa warga NU yang banyak diharapkan banyak juga kursi yang diperoleh di DPRD, akan tetapi PKB Kabupaten Ponorogo menduduki peringkat kedua setelah GOLKAR bukan peringkat pertama. Padahal sebagai partai politik diharapkan lebih mampu melakukan fungsi sebagai partai politik dalam hal rekrutmen politik untuk merekrutkader-kader untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan.

Lebih jauh bagaimana implementasi fungsi rekrutmen partai politik yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa dalam

merekruit kader-kader partai. Untuk itulah penulis mencoba mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian yang berjudul “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik (studi kasus rekrutmen kader pada DPC PKB Kabupaten Ponorogo) ”.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Rekrutmen Politik

1. Model Rekrutmen dan Seleksi Politik

Rekrutmen dan seleksi politik merupakan proses yang menentukan karakteristik bakal calon yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan jabatan atau posisi tertentu. Maka berbagai macam [0] cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil bakal calon atau pelamar yang sesuai kriteria. Menurut Djuhandar (2005: 104) terdapat beberapa model rekrutmen dan seleksi politik yang [0] biasa digunakan, yaitu:

a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan Merupakan cara rekrutmen yang dianggap paling [0] penting mengingat cara ini memiliki banyak keragaman dan mempunyai implikasi penting bagi perekrutan politik.

b. Perebutan kekuasaan Perebutan kekuasaan dilakukan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan. Perebutan kekuasaan dapat dilakukan dengan 15 coup d'etat, revolusi, in tervensi militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat. Cara tersebut bisa dijadikan sarana untuk mengefektifkan perubahan radikal pada

personil di tingkat-tingkat yang lebih tinggi dalam partisipasi politiknya. Akibat yang paling langsung dan nyata dari model ini adalah penggantian para pemegang jabatan politik, akan tetapi perubahan perubahan dalam politik birokrasi biasanya menimbulkan hasil lebih lambat, terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.

c. Patronag

Model rekrutmen ini merupakan bagian dari sistem penyusunan dan korupsi yang rumit. Model [0] ini merupakan cara yang mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilu.

d. Koopsi [0] Koopsi (co-option) merupakan model rekrutmen pemilihan anggota-anggota baru, meliputi pemilihan seseorang dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada. Model rekrutmen dan [0] seleksi politik juga dijelaskan oleh Philip Althop dan Michael Rush. Keduanya membagi model [0] rekrutmen dan seleksi politik kedalam tujuh model, yaitu: 1) Seleksi melalui ujian dan pelatihan. Model ini merupakan model yang umum digunakan, [0] [0] biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan jabatan birokrasi dan administrasi.

2) Seleksi melalui penyortiran. Model ini dilakukan dengan melakukan penyortiran atau [0] penarikan undian. Model ini digunakan

untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik. [0]

3) Seleksi melalui rotasi dan giliran. Model ini dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan [0] [0] dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu.

4) Melalui perebutan kekuasaan. Model ini biasanya digunakan dengan jalan menggunakan [0] atau mengancam kekerasan.

5) Melalui Patronage. Model ini dilakukan dengan penyuaian dan korupsi. Model ini banyak [0] [0] digunakan oleh masyarakat Inggris.

6) Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah Model ini merupakan [0] pembedaan kasar terhadap kekuasaan aristokrasi.

7) Melalui Koopsi. Model ini dilakukan dengan cara di mana pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe tipe pemimpin tertentu.

Sedangkan Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011: 99) menyebutkan dua model pengambilan keputusan yaitu:

a. Model pemilihan

Dalam model pemilihan, penominsian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan

murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa [0] seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi.

b. Model penunjukan [0]

Dalam model penunjukan, penentuan kandidat tanpa melalui pemilihan. Dalam sistem [0] penunjukan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominsian oleh partai atau pemimpin partai.

Sedangkan menurut pendapat Geddes mengklasifikasikan rekrutmen menjadi 4 model, yaitu :

a. Partisanship, yakni rekrutmen kader yang dinilai atas loyalitasnya pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan dan kurang memperhatikan kompetensi.

b. Meritocratic, ialah rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti pengusaha, teknokrat, guru dan pekerja ahli.

c. Compartmentalization adalah rekrutmen politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokrasi informal bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan penting bagi keberhasilan pragmatis sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan- pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut loyal.

d. Survival, ialah rekrutmen politik yang didasarkan pada pelamar dan umumnya cenderung patronas (Gaddes, 1996: 78-79).

Berdasarkan pada pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa setidaknya banyak model perekrutan dan seleksi yang bisa digunakan. Model perekrutan yang sesuai

dengan latar belakang masalah kurangnya kader dan elit politik yang kurang berkualitas maka penulis memilih model yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Barbara Geddes. Geddes mengklasifikasikan rekrutmen politik menjadi 4 model yaitu Partisanship, Meritocratic, Compartmentalization, Survival.

Model ini mengingat sering dijumpai sehingga lebih mengutamakan kualitas kader untuk menentukan kualitas partai dan keberlangsungan partai sebagai bagian dari system politik di suatu Negara.

2. Prinsip-Prinsip Rekrutmen

Berdasarkan pada pendapat kepala badan kepegawaian nasional (Rahmadaniza, 2006: 10), dalam melakukan rekrutmen sudah seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip rekrutmen yaitu :

a. Semua warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama. Bahwa setiap warga mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah.

b. Berdasarkan syarat-syarat objektif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 pasal 6 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yaitu:

- 1) Warga negara Indonesia.
- 2) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang

tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

3) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

4) Berkelakuan baik

5) Sehat jasmani dan rohani

6) Tidak berdasarkan golongan, agama atau ras. Pengangkatan dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Berdasarkan keterangan di atas maka penulis [0] berpendapat bahwa prinsip rekrutmen yaitu proses rekrutmen bisa diikuti oleh semua warga negara tanpa membedakan agama, golongan dan ras dan yang telah memenuhi syarat-syarat objektif yang ditetapkan.

3. Sifat Rekrutmen

Proses rekrutmen merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Proses rekrutmen politik juga merupakan proses yang melibatkan seluruh warga negara. Menurut Haryanto (Rahmadaniza, 2006: 11) sifat rekrutmen dibagi kedalam dua jenis yaitu:

a. Rekrutmen secara terbuka

Rekrutmen secara terbuka dilaksanakan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut dalam proses perekrutan

apabila telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Rekrutmen secara tertutup

Rekrutmen ini merupakan cara rekrutmen dimana hanya individu tertentu yang dapat ikut dalam proses perekrutan untuk selanjutnya dapat menduduki jabatan tertentu. Kesempatan dalam rekrutmen ini tidak terbuka untuk seluruh masyarakat. Perekrutan hanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan tertentu. Berdasarkan pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa rekrutmen dapat bersifat terbuka dengan maksud bahwa proses rekrutmen dapat diikuti oleh siapa saja yang telah memenuhi persyaratan. Akan tetapi proses rekrutmen juga dapat bersifat tertutup yang berarti bahwa hanya individu-individu tertentu saja yang bisa mengikuti proses perekrutan.

4. Jalur Rekrutmen dan Seleksi Politik

Mendapatkan individu yang memiliki kemampuan dan kualitas terbaik bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu banyak jalur yang digunakan untuk dapat melaksanakan rekrutmen dan [0] seleksi politik. Dikutip dari Asyifa (asyiepha. blogspot.com, Diakses Minggu, 10 Januari pukul 23:45). Terdapat beberapa jalur yang bisa digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik yaitu:

a. Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partai artinya koalisi koalisi partai merupakan bagian terpenting di dalam rekrutmen politik karena sebagian besar

kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil koalisi-koalisi antar partai yang berperan dalam suatu lingkup politik. Artinya rekrutmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai.

b. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.

c. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.

d. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial. Di zaman modern ini jalur rekrutmen primordial tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomena itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindahtangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan.

Fenomena ini dikenal dengan nama "rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial".

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa jalur yang bisa digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik antara lain melalui jalur koalisi, berdasarkan kemampuan, kaderisasi ataupun berdasarkan ikatan primordial atau kekerabatan.

METODE

Dalam penelitian Implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik (studi kasus rekrutmen kader pada DPC PKB Kabupaten Ponorogo) ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (Moleong, 1999: 3) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Menurut Kirl dan Miller (Moleong, 1999: 3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilahnya.

Pendapat lain juga dikemukakan Sugiyono (2013: 1) Menurutnya bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini, diharapkan peneliti dapat menemukan berbagai data yang dibutuhkan dalam proses penelitian, untuk kemudian diolah dan dijadikan sebagai penyusunan hasil kegiatan .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model rekrutmen politik pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil temuan di lapangan rekrutmen politik yang dijalankan di DPC PKB Kabupaten Ponorogo bahwa menggunakan model rekrutmen partisanship rekrutmen yang dinilai atas loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan dan kurang memperhatikan kompetensi. Menurut semua responden rekrutmen politik sangatlah diperlukan untuk menjadi tonggak kekuatan partai serta regenerasi partai yang berkelanjutan. Loyalitas partai dari data pengurus aktif mengenai lamanya tahun keanggotaan atau kepengurusan di partai. Loyalitas keanggotaan di partai biasanya dilihat dari lamanya keanggotaan atau pengurus menjabat minimal 4 tahun,

karena untuk aktif menjadi pengurus tingkat cabang menurut AD/ART partai pasal 16 untuk menjadi pengurus harian harus aktif menjadi anggota PKB minimal 2 tahun. Menurut data pengurus aktif 28 orang semuanya lebih dari 4 tahun lamanya keanggotaan di partai, prosentasenya sebanyak 100%. Dalam merekrut kader kompetensi memang penting untuk kualitas partai, akan tetapi loyalitas yang diutamakan untuk menunjukkan ketertarikan di partai dan komitmennya di partai.

Untuk bergabung ke partai harus melalui tahapan diantaranya, mendaftarkan diri tidak dipungut biaya, ada formulir yang harus diisi oleh seseorang yang ingin menjadi anggota PKB mereka yang ingin daftar difoto, namanya diinput sesuai KTP sehingga menjadi data base sewaktu-waktu dilakukan verifikasi partai peserta pemilu dan mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai pendidikan kaderisasi di PKB untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas.

Berdasarkan hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa model rekrutmen politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ponorogo yang paling dominan menggunakan model partisanship yang mencapai prosentase 100% dari data pengurus DPC 28 orang dan 42 perwakilan DPAC setiap kecamatan di Ponorogo.

2. Prinsip-Prinsip Rekrutmen Politik

Rekrutemen politik haruslah sesuai dengan prinsip yang berlaku yaitu Syarat-

syarat objektif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002. Berdasarkan temuan di lapangan pada rekrutmen politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

a. Semua Warga Negara Mempunyai Kedudukan hokum yang sama

Setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. DPC PKB dalam melaksanakan rekrutmen menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, tidak membedakan apabila seseorang akan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Semua warga Negara tidak perlu takut untuk masuk ke politik khususnya partai politik karena semua mempunyai hak yang sama dalam hukum.

b. Warga Negara Indonesia

Prinsip rekrutmen politik haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku agar ada acuan untuk melaksanakan setiap keputusan untuk kemajuan partai. Partai politik pastinya harus asli Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah otomatis berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali.

DPC PKB Kabupaten Ponorogo untuk merekrut kader, anggota, calon legislatif maupun Kepala Daerah juga

- 95 **Nia Rochmawaty**, *Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik (Studi Kasus Kader pada DPC PKB Kabupaten Ponorogo)*. Penerbitan Artikel Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo

harus asli WNI yang asli dari Daerah Kabupaten Ponorogo misalnya DPRD Ponorogo bukan daerah lain. Berbeda lagi kalau untuk wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu boleh mencalonkan di daerah lain karena wilayahnya sudah Nasional tetapi tetap WNI asli. Akan tetapi WNA yang sudah berdomisili di Indonesia keturunan asing misalnya Cina maka itu sah sah saja selama sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Untuk membuktikan bahwa seseorang asli Warga Negara Indonesia (WNI) dengan menunjukkan KTP sehingga nantinya bisa diinput untuk pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA).

c. Tidak Pernah di hukum Penjara

Persyaratan yang selanjutnya yaitu tidak pernah di hukum penjara, jika seseorang yang akan menjadi bagian dari partai politik tentunya harus bebas dari jeratan hukum yang telah lalu ataupun masa sekarang. Begitu juga dengan PKB Kabupaten Ponorogo juga melaksanakan perekrutan mempunyai syarat tidak adanya riwayat rekam jejak pernah dihukum penjara, hal ini karena akan membawa nama partai kedepannya.

d. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan

Syarat selanjutnya yaitu mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan merupakan syarat yang penting guna memperoleh kader yang mempunyai potensi demi kemajuan partai. DPC PKB Kabupaten Ponorogo untuk merekrut kader, anggota, pengurus, maupun legislatif hingga eksekutif haruslah mempunyai pendidikan untuk mencari sumber daya manusia yang terampil cakap dan mampu membawa nama partai. Oleh karena itu pendidikan sangatlah dibutuhkan mengingat kredibilitas seseorang dibutuhkan demi kemajuan partai. Menurut data 42 orang perwakilan DPAC se-Ponorogo semua mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya SMA/ sederajat. Oleh karena pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan menjadi syarat untuk menjadi bagian dari PKB Kabupaten Ponorogo karena kualitas sumber daya muasianya juga menentukan kualitas partai sehingga partai dipandang masyarakat partai yang mempunyai kredibilitas yang baik, akan tetapi tidak harus berpendidikan tinggi.

e. Berkelakuan baik

Prinsip selanjutnya Seorang calon kader, anggota, calon legislatif maupun kepala daerah berkelakuan baik menjadi syarat yang harus dimiliki, karena jika

nantinya terjun di masyarakat tidak mempunyai sopan santun maka akan diacuhkan oleh masyarakat dan tidak akan memperoleh simpati. Masyarakat akan memilih jika nanti dicalonkan menjadi legislatif maupun eksekutif dengan berkelakuan baik pada masyarakat. Karena ini berhubungan dengan sopan santun kader saat bersosialisasi menarik simpatisan untuk mendapatkan basis massa yang banyak. Oleh karena itu DPC PKB juga menerapkan prinsip ini dalam rekrutmen politik yang ada di DPC PKB Kabupaten Ponorogo.

f. Sehat Jasmani dan Rohani

Prinsip yang selanjutnya yaitu sehat jasmani dan rohani artinya secara dhoir maupun batin tidak mempunyai penyakit. Ketika seseorang secara jasmani dan rohani sehat maka segala tugas yang akan dibebankan akan menjadi mudah untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan DPC PKB Kabupaten Ponorogo dalam merekrut baik kader, anggota, pengurus maupun legislative serta kepala daerah haruslah mempunyai syarat sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan secara jasmani dan rohani sehat, misalnya juga surat keterangan bebas dari narkoba.

g. Tidak Berdasarkan Golongan, Agama atau Ras

Prinsip yang selanjutnya untuk dipenuhi untuk dijadikan calon kader calon anggota, calon legislatif maupun calon kepala daerah yaitu tidak berdasarkan golongan, agama maupun ras. Sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila tidak pantas untuk membedakan golongan, agama maupun ras. Begitu juga dengan DPC PKB Kabupaten Ponorogo dalam merekrut kader, anggota, legislatif maupun kepala daerah tidak membedakan golongan, agama maupun ras untuk berkomitmen dengan PKB.

Siapapun boleh mendaftar ke PKB asalkan sesuai dengan syarat dan peraturan yang ada, dan PKB meskipun lahir dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) akan tetapi PKB membuka peluang bagi siapa saja untuk masuk ke PKB tanpa terkecuali non muslim pun bisa mendaftar di DPC PKB Kabupaten Ponorogo sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi menurut data pengurus DPC berjumlah 28 orang dan DPAC se-Ponorogo berjumlah 42 orang pada lampiran no 5 dan 6 bahwa mayoritas beragama islam.

3. Sifat Rekrutmen politik di DPC PKB Kabupaten Ponorogo

Rekrutmen politik merupakan usaha untuk mencari dan mengajak orang untuk menjadi bagian dari partai politik. Sifat rekrutmen politik ada dua yaitu sifat terbuka dan sifat tertutup. Pertama, Sifat rekrutmen terbuka merupakan rekrutmen yang dilakukan secara terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut dalam proses rekrutmen apabila memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Setiap masyarakat berhak untuk ikut serta dalam perekrutan di partai politik serta memilih calon-calon pemimpin di dalam negaranya sampai pengumuman dari hasil kompetisi yang dilakukan secara terbuka dengan proses demokrasi. DPC PKB Kabupaten Ponorogo sesuai AD/ART Bab IV Pasal 5 yang menjelaskan partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka. Masyarakat pada umumnya boleh ikut mendaftar di DPC PKB Kabupaten Ponorogo tentunya sesuai peraturan yang ada.

Untuk mengetahui adanya rekrutmen di PKB masyarakat umum dapat mengetahui atau memperoleh informasi lewat media massa, bisa media massa elektronik, Koran, bisa media massa online, itu harapannya mereka yang berasal dari akademisi, pensiunan dan lain-lain ya itu sebagai sarana untuk mengikuti rekrutmen.

Peraturan diatur lebih spesifik di dalam peraturan partai Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perekrutan.

Biasanya PKB juga melakukan kegiatan untuk menarik kalangan olahraga mengadakan turnamen bola ping pong, untuk menarik kalangan agama mengadakan musabaqoh kitab kuning, dan juga ada juga donor darah untuk kalangan umum. DPC PKB Kabupaten Ponorogo sebagai pilihan dalam melaksanakan perekrutan karena DPC PKB Kabupaten Ponorogo bersifat terbuka dan tidak dengan sembunyi-sembunyi dan berlaku bagi siapapun yang ingin mendaftar sebagai bagian dari PKB Kabupaten Ponorogo baik rekrutmen kader, anggota, pengurus maupun legislatif hingga calon kepala daerah.

Jadi DPC PKB Kabupaten Ponorogo mempunyai sifat terbuka dalam perekrutan kader, anggota, maupun legislatif dengan menggunakan media massa untuk mencari kader sehingga siapapun masyarakat umum boleh mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi menurut data dari 28 orang pengurus DPC Ponorogo dan 42 orang perwakilan pengurus DPAC setiap kecamatan mayoritas adalah warga NU dan beragama islam.

4. Jalur Rekrutmen partai

Setiap partai politik pastinya mempunyai jalur yang berbeda untuk

rekrutmen politik yang digunakan. Tidak mudah menarik individu untuk bergabung dengan partai dan mendapatkan individu yang memiliki kemampuan yang terbaik. Oleh karena itu banyak jalur yang digunakan untuk dapat melaksanakan rekrutmen dan seleksi politik. Dikutip dari Asyifa (Asyiepa. Blogspot.com, diakses minggu, 10 januari pukul 23:45). Terdapat beberapa jalur yang bisa digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik.

Jalur koalisi atau pimpinan-pimpinan partai yang dimaksudkan merupakan jalur rekrutmen yang sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik diadopsi dari hasil koalisi antar partai. Biasanya rekrutmen ini terjadi di parlemen, saat sudah menjadi legislatif untuk menentukan eksekutif. DPC PKB Kabupaten Ponorogo dalam melakukan rekrutmen ini untuk kader, anggota, pengurus dan legislatif tidak menggunakan jalur koalisi akan tetapi dari intern partai. Berbeda kalau untuk menentukan eksekutif seperti kepala daerah PKB melakukan koalisi dengan partai lain.

Kemampuan atau kredibilitas sebagai pertimbangan seorang kader yang nantinya ingin mencalonkan sebagai legislatif ataupun eksekutif, ada skor tersendiri tidak harus yang berbakat, tetapi seberapa banyak massa yang diperoleh disaat pemilu nantinya. Menurut data KPU bahwa pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 PKB mencalonkan bakal calon bupati tidak murni dari partai

sendiri akan tetapi menjalin koalisi dengan partai lain yaitu PDI perjuangan. Sebagai partai yang mayoritas adalah warga NU, PKB dalam hal ini belum mendapatkan suara terbanyak atas pemilih bupati tahun 2015 yang mencalonkan H. Amin, SH. Dan Agus Widodo yang memperoleh 123761 suara.

Selanjutnya jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi yang dipilih DPC PKB dalam merekrut kader ini artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggota yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi. Kaderisasi merupakan hal yang penting dalam proses rekrutmen untuk mencetak generasi partai yang mampu menjadi pemimpin. DPC PKB melakukan kaderisasi dalam perekrutan, kaderisasi di PKB sudah mulai berjalan yang pertama ditekankan pada pengurus, yang kedua ke fraksi-fraksi yang sudah ada ditegaskan untuk melakukan pembentukan kader. Ada waktu-waktu khusus untuk pembinaan kader yang berupa pelatihan-pelatihan. Kaderisasi dibebankan fraksi atau pengurus partai untuk disampaikan ke pengurus partai baik tingkat ranting maupun anak cabang untuk melakukan kaderisasi.

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jalur rekrutmen pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggunakan jalur koalisi untuk merekrut calon kepala daerah menurut data dari KPU

pada PILKADA dengan mengusung pasangan H. Amin, SH.dari PKB dan AGUS Widodo, SE, M.Hum dari PDI Perjuangan dengan perolehan 123761 suara. Akan tetapi untuk perekrutan kader anggota dan pengurus tidak menggunakan jalur koalisi. Rekrutmen secara koalisi hanya akan menentukan eksekutif seperti kepala daerah ataupun presiden dan juga menggunakan jalur kaderisasi untuk merekrut kader, anggota, maupun legislatif serta kepala daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan pada pembahasan bab iv dapat disimpulkan bahwa:

1. Model rekrutmen politik di DPC PKB Kabupaten Ponorogo menggunakan model partisanship yang merupakan rekrutmen berdasarkan atas loyalitas pada partai, mengumpulkan partisan dan kurang memperhatikan kompetensi. Kompetensi dibuktikan nanti komitmennnya di partai seiring berjalannya waktu. Loyalitas partai dilihat dari lamanya menjadi anggota partai data dari pengurus partai menurut data lamanya kepengurusan atau keanggotaan dari 28 pengurus di partai sebanyak 100% masa jabatan lebih dari 4 tahun.

2. Prinsip rekrutmen politik di DPC PKB Kabupaten Ponorogo sesuai dengan aturan yang ada yaitu semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan berdasarkan syarat-syarat objektif yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002. Prinsip itu diantaranya harus Warga Negara Indonesi (WNI) dibuktikan dengan KTP dan KTA bahwa dari data pengurus DPC PKB Kabupaten Ponorogo, tidak pernah dihukum penjara, mempunyai pendidikan, ketrampilan, kecakapan, keahlian, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, tidak berdasarkan golongan, agama maupun ras akan tetapi mayoritas menurut data dari pengurus DPC PKB 100% beragama islam.

3. Sifat rekrutmen politik yang ada di DPC PKB Kabupaten Ponorogo yaitu mempunyai sifat terbuka sesuai AD/ART BAB IV Pasal 5 bahwa partai bersifat kebangsaan, demokratis, dan terbuka. Rekrutmen ini dilakukan tidak dengan sembunyi-sembunyi dan berlaku bagi siapapun yang ingin mendaftar sesuai aturan yang berlaku, akan tetapi mayoritas dari data pengurus DPC PKB 28 orang dan DPAC perwakilan kecamatan 42 orang menunjukan mayoritas dari kalangan organisasi NU.

4. Jalur rekrutmen pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggunakan jalur koalisi untuk merekrut calon kepala daerah menurut data dari KPU pada PILKADA dengan mengusung pasangan H. Amin, SH.dari PKB dan AGUS Widodo, SE, M.Hum dari PDI Perjuangan dengan perolehan 123761 suara. Akan tetapi untuk perekrutan kader anggota dan pengurus tidak menggunakan jalur koalisi. Rekrutmen secara koalisi hanya akan menentukan eksekutif seperti kepala daerah ataupun presiden dan juga menggunakan jalur kaderisasi untuk merekrut kader, anggota, maupun legislatif serta kepala daerah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Partai politik perlu lebih meningkatkan implementasi rekrutmen politik melalui program-program kerja agar masyarakat pada umumnya tertarik untuk bergabung dengan partai.
2. DPC PKB Kabupaten Ponorogo diharapkan lebih meningkatkan pendidikan kaderisasi yang terprogram agar menghasilkan sumber daya manusia kader-kader yang berkualitas demi kemajuan partai.
3. DPC PKB Kabupaten Ponorogo diharapkan lebih meningkatkan

eksistensinya dengan sosialisasi di seluruh elemen masyarakat

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. and Coleman, James S. 1966. *News The Politics of Developing Areas*. Jersey: Princeton University Press
- dalam Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Amal, Ichlasul. 1996. . Yogyakarta. Tiara Teori-Teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi Wacana.
- Barbara, Geddes. 1994. . *Politician's Dillema, Building state capacity in Latin America* University of California Press: Barkley.
- Budiardjo, Mirriam. 2008. . Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*
- Djuhandar, Erom. 2005. . Universitas Lampung. *Bandar Lampung Sosiologi Politik*.
- Firmansyah. 2008. *Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexi J. 2011. Bandung. Remaja Rosdakarya. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Pamungkas, Sigit. 201. *Partai Yogyakarta : Institute For Politik Teori dan Praktik di Indonesia. Democracy and Welfarisme*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 *Tentang Prinsip Rekrutmen Politik*.
- Putra, Fadilah.. 2003. . Yogyakarta. *Pustaka Pelajar. Partai Politik dan Kebijakan Publik*

101 **Nia Rochmawaty**, *Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik (Studi Kasus Kader pada DPC PKB Kabupaten Ponorogo)*. Penerbitan Artikel Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo

- Rahmadaniza. 2006 . Jakarta. Gramedia. .
Dasar-Dasar Ilmu Politik
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2007. Alih Bahasa oleh Kartini Pengantar Sosiologi Politik. Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadili, Samsudin. 2006. . Bandung: Pustaka Setia. Manajemen Sumber Daya Manusia
- Skripsi. Roni Tamara Saputra. 2014. Sistem Kaderisasi Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2009 (Studi Kasus Partai GOLKAR Kabupaten Pasen Utara). Pasen Utara.
- Sugiyono. 2013. . Bandung. Alfabeta. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif
- Suprihatini. 2008. . Klaten. Cempaka Putih. Partai Politik.
- Surbakti, Ramlan. 1999. . Jakarta. Gramedia Widiasarana. Memahami Ilmu Politik
- Tesis. Dwi Agus Prayitno. 2014. Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisai Politik pada DPC PKB Kabupaten Ponorogo. Ilmu Sosial. FISIP. Universitas Kadiri.
- Wasistiono, Sadu, M.S. 2001. Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Alqaprint.
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.
- Sumber lain:
Asyiepha blogspot.com diakses minggu 10 Januari 23:45